

SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO

Kecamatan Tenga • Kabupaten Minahasa • Sulawesi Utara
1999



**PROFIL SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO,
KECAMATAN TENGA, KABUPATEN MINAHASA, SULAWESI UTARA
1999**

Kerjasama :

Proyek Pesisir Sulawesi Utara

dengan

BAPPEDA Propinsi Sulawesi Utara



**Meidiarti Kasmidi
Arnold Ratu
Erick Armada
Jefta Mintahari
Ismet Maliasar
Donald Yanis
Femmy Lumolos
Norma Mangampe**

Dana untuk persiapan dan percetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan USAID-CRC/URI Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (CRMP)

Dicetak di : Jakarta

Kutipan :

Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos dan N. Mangampe. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penerbitan khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 31 Halaman.

Kredit :

Foto halaman depan oleh : Norma Mangampe, Tanyo Bangun dan Meidi Kasmidi

Peta : Audrie Siahainenia, Asep Sukmara.

Layout : Asep Sukmara, Daisy Malino, dan Matt Castigliero.

Finishing Layout: Production House Proyek Pesisir Jakarta

Daftar Istilah dan Singkatan

Senso	: Mesin pemotong kayu yang istilah umumnya chainsaw tapi masyarakat biasa menyebutnya dengan senso atau sensor	LMD	: Lembaga Musyawarah Desa
Tibo-tibo	: Pedagang pengumpul	LP3M	: Lembaga Pengkajian Pedesaan, Pantai dan Masyarakat
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
BANGDES	: Pembangunan Desa	MCK	: Mandi Cuci Kakus
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PU	: Pekerjaan Umum
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	SD	: Sekolah Dasar
BLK	: Balai Latihan Kerja	SMP	: Sekolah Menengah Pertama
BNI	: Bank Negara Indonesia	SULUT	: Sulawesi Utara
Ditjen BANGDA	: Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah	UNSRAT	: Universitas Sam Ratulangi
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan	USA	: United State of America
KANDEP P dan K	: Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	USAID	: United States Agency for International Development
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	WC	: Water Closet

Kata Pengantar

Proyek Pesisir (Proyek Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir) merupakan bagian dari program pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh USAID dan Pemerintah Indonesia, melalui kerjasama antara USAID, Universitas Rhode Island dan BAPPENAS yang ditetapkan dengan perjanjian Teknis pada tahun 1996.

Tujuan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara adalah pengembangan model desentralisasi dan penguatan kelembagaan dan perorangan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. Di tingkat desa, model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki serta mempertahankan kualitas sumberdaya pesisir.

Desa Blongko adalah salah satu desa Proyek Pesisir selain 3 desa lainnya yang dipilih dari 109 Desa Pesisir Minahasa. Melalui profil ini digambarkan isu-isu pesisir yang ada di Desa Blongko, baik yang sudah dan sementara ditangani maupun yang sama sekali belum mendapat penanganan.

Pembuatan profil ini berlangsung dengan tahapan-tahapan proses cukup panjang yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisis isu yang dilaksanakan oleh kelompok inti difasilitasi oleh penyuluh lapangan dan asisten penyuluh lapangan Proyek Pesisir Desa Blongko.
2. Pelatihan kelompok inti menyangkut pemahaman pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat dan manfaat pembuatan profil.
3. Hasilnya adalah kumpulan dan prioritas isu yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat oleh kelompok inti dan penyuluh lapangan dalam pertemuan-pertemuan baik pertemuan formal maupun nonformal.
4. Masukan dan koreksi dari hasil sosialisasi ini dimasukkan ke dalam dokumen sementara profil oleh penyuluh lapangan yang kemudian dipresentasikan oleh penyuluh lapangan dalam satu seminar informal proyek pesisir untuk mendapatkan masukan teknis dari tim proyek pesisir dan konsultan.
5. Draft ini kemudian disusun dalam suatu bentuk profil sumberdaya wilayah pesisir dan hasilnya sebagaimana apa adanya sekarang ini.

Pembuatan profil ini merupakan bagian dari langkah pertama dalam siklus kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu yakni identifikasi isu. Khusus Desa Blongko, setelah diadakan berbagai penyuluhan, studi banding, dan pelatihan-pelatihan oleh Proyek Pesisir dan lembaga terkait lainnya, maka masyarakat Desa Blongko memutuskan untuk membuat Daerah Perlindungan Laut oleh masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan awal pengelolaan jangka panjang. Dalam bulan Agustus 1998, masyarakat menyetujui Keputusan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut yang dapat dicatat sebagai sejarah awal terbentuknya daerah perlindungan laut berbasis masyarakat tingkat desa yang pertama di Indonesia. Persetujuan ini merupakan sejarah yang sangat penting yang menunjukkan tekad dan keinginan masyarakat untuk secara bertanggung jawab memelihara sumberdaya pesisir mereka. Sebagai bagian dari pelaksanaan awal, masyarakat desa telah membangun pusat informasi yang merupakan sarana informasi pengelolaan wilayah pesisir, sarana pendidikan masyarakat, dan tempat pertemuan masyarakat untuk memutuskan langkah-langkah pengelolaan sumberdaya pesisir.

Profil ini diterbitkan sebagai model awal bagi pembentukan profil di desa yang dapat dibuat lebih sederhana lagi. Semoga profil ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam rangka memperbaiki pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, yang selanjutnya akan meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Manado, Juni 1999
J. Johnnes Tulungen
Program Manager, Proyek Pesisir Sulawesi Utara.

Brian R. Crawford
Technical Advisor, Proyek Pesisir Sulawesi Utara.

Ian M. Dutton
Pimpinan, Proyek Pesisir Indonesia.

Sambutan Kepala Desa Blongko

Pekerjaan menyusun Rencana Pembangunan Desa bukanlah hal yang mudah jika tidak didukung oleh data dan informasi yang memadai. Hal ini sangat penting agar obyek yang akan dibangun dapat diketahui dengan jelas, rencana mudah dipahami dan dapat dilaksanakan serta bersifat pemecahan masalah. Selain itu rencana tersebut harus bermakna dalam tujuan pembangunan dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang memahami cara penyusunan Rencana Pembangunan Masyarakat Desa, dalam hal ini disebut dengan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sejalan dengan keberhasilan Pembangunan Nasional maka hal-hal mengenai pendataan yang tercakup dalam sistem pendataan perlu disempurnakan dan dirangkum dalam suatu data dasar untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai alat pengumpulan isu-isu penting seperti potensi, serta permasalahan yang ada di desa.

Dengan tersusunnya profil ini diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi isu yang ada di desa sebagai bahan untuk menganalisa dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh program pembangunan yang berlokasi di desa.

2. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan melalui pemahaman yang tepat tentang isu-isu yang ada di desa.

Dilandasi kesadaran bahwa sistem pendataan dan penyusunan Profil ini merupakan hasil dari ketulusan dan ketekunan berkarya, maka sudah sepantasnyalah bila kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunlah sistem pendataan/profil sumberdaya wilayah pesisir Desa Blongko ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh pengabdian bagi kepentingan masyarakat khususnya Desa Blongko yang kita cintai bersama.

Blongko, Juni 1999
Kepala Desa Blongko

Phillep Dandel

Sambutan Ketua BAPPEDA Propinsi Sulut

Saya menyambut dengan gembira penerbitan publikasi “Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko” karena ini merupakan hasil dari suatu usaha nyata masyarakat desa yang sifatnya sangat luas dan menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat khususnya masyarakat Desa Blongko, mampu mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu utama pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di wilayahnya sendiri. Dengan demikian diharapkan masyarakat Desa Blongko pun dapat secara mandiri memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Seiring dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peranan desa akan semakin menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Demikian pula halnya dengan pembangunan wilayah pesisir dan lautan karena semakin tegaslah kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan melihat hal tersebut maka Program Proyek Pesisir akan semakin strategis peranannya dalam mengupayakan desentralisasi masyarakat desa dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautan.

Sehubungan dengan Publikasi ini maka ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan perhatian yang sangat besar mulai dari awal implementasi Proyek Pesisir sampai dengan saat ini.

Kepada perwakilan USAID Indonesia di Jakarta melalui Proyek Pesisir Manado yang telah mendanai dan memfasilitasi sejak proses

penyusunan sampai dengan penerbitan buku ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dengan tetap berharap agar kerjasama ini semakin ditingkatkan. Penghargaan kami sampaikan pula kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) Minahasa yang secara nyata telah terlibat aktif serta memberikan iklim positif dalam proses penyusunan buku profil ini.

Akhirnya penghargaan ini pula saya sampaikan kepada masyarakat Desa Blongko dengan harapan semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Desa Blongko serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Blongko. Dengan tetap berpegang teguh pada Motto Sulawesi Utara yaitu : *Disiplin nafasku, Prestasi tujuanku, Persatuan dan Kesatuan di atas segala-galanya*, mari kita bangun Bumi Nyiur Melambai menuju masyarakat yang lebih makmur dan adil.

Manado, Juni 1999
Ketua Bappeda Propinsi Sulawesi Utara

Drs. J. Saruan

Ucapan Terima Kasih

Penyelesaian profil ini sangat didukung oleh berbagai pihak baik secara individu maupun lembaga. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Drs. Butarbutar, Bpk. Irwandi Idris dan Bpk. Sapta Putra Ginting dari Ditjen Bangda beserta Bpk. Drs. J. Saruan, Bpk. Ir. Alexander J. Wowor dan Bpk. Ferdinand Pua, SH dari Bappeda Tkt I Sulawesi Utara atas segala dukungan dan masukan dalam mendorong masyarakat desa dan Proyek Pesisir mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Blongko lewat kunjungan dan diskusi langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap individu dan lembaga yang telah membantu dalam penyelesaian Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko.

Terima kasih yang terdalam penulis sampaikan kepada Bapak Phillep Dandel selaku kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan agama, kepala-kepala dusun, LKMD, LMD dan seluruh masyarakat Desa Blongko yang sudah memberikan pikiran dan saran-saran dalam penggalan isu-isu di Desa Blongko. Terima kasih kepada Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan Kelompok Inti yang sudah bekerja sama dengan baik dalam semua kegiatan khususnya dalam penyusunan profil ini, sejak pelatihan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Tomohon sampai pada sosialisasi dan penggalan isu/pikiran masyarakat.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan, semua staf Proyek Pesisir serta konsultan yang telah memberikan berbagai

bentuk bantuan, fasilitas dan masukan sehingga profil ini dapat tersusun dengan baik. Staf Proyek Pesisir tersebut adalah antara lain Johnnes Tulungen, Christovel Rotinsulu, Lissa Ingkiriwang, Daisy Malino, Melky Mainsega, Noni Tangkilisan, Maria Dimpudus, Egmond Ulaen, Priciellia Kussoy, Audrie Siahainenia, Brian Crawford dan Ian Dutton. Serta Janny D. Kusen, Yenny Morasa, Denny Karwur dan Pier Gosal.

Terima kasih pula kepada USAID (*United States Agency for International Development*) yang telah memberikan dukungan dana sehingga profil ini bisa disusun dan diselesaikan.

Manado, Juni 1999

Meidiarti Kasmidi
Arnold Ratu
Erick Armada
Jefta Mintahari
Ismet Maliasar
Donald Yanis
Femmy Lumolos
Norma Mangampe

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	i
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KEPALA DESA BLONGKO	iii
SAMBUTAN KETUA BAPPEDA PROPINSI SULUT	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
KEARAH PROSES PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU	1
GAMBARAN UMUM DESA BLONGKO	3
ISU-ISU PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DI DESA	7
- Penanggulangan Banjir	8
- Penyaluran Air Bersih	9
- Perusakan Hutan (Daerah Resapan Air).....	10
- Perusakan Hutan Bakau	11
- Erosi Pantai	12
- Pemasaran Hasil Perikanan	14
- Anak Putus Sekolah	15
- Sanitasi Lingkungan	16
- Penangkapan Satwa Langka	17
- Penangkapan Ikan yang Merusak	18
- Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Perkebunan	19
PERENCANAAN	21
- Perencanaan Oleh Masyarakat	22
- Daerah Perlindungan Laut	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	27

Ke Arah Proses Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu

Dokumen profil ini dihasilkan sebagai satu langkah awal dari serangkaian tahapan atau langkah-langkah proses kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Sudah diterima dan disepakati secara luas bahwa proses dimana program pengelolaan sumberdaya pesisir digambarkan mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan. Siklus tersebut terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut:

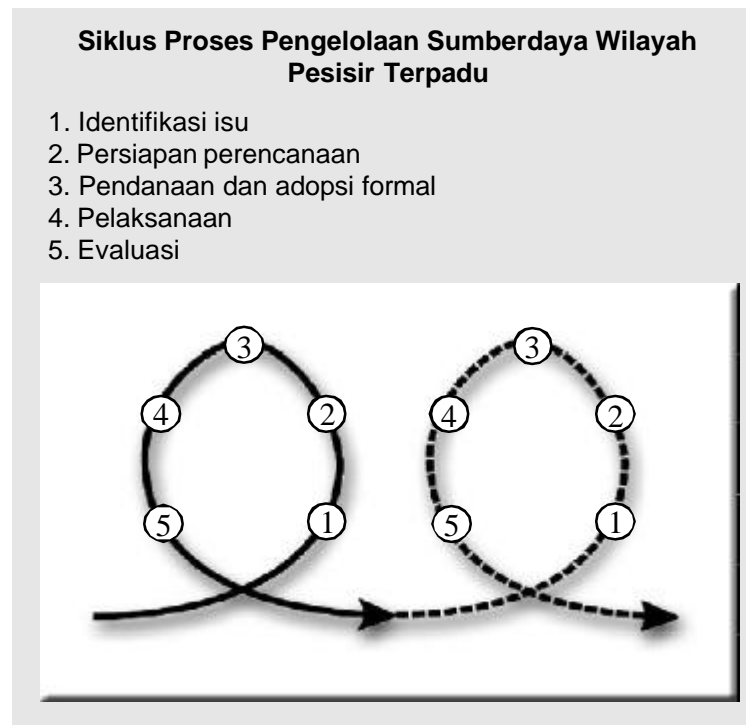
1. Identifikasi isu-isu sumberdaya pesisir (Langkah Pertama)
2. Persiapan atau perencanaan program (Langkah Kedua)
3. Pendanaan dan adopsi formal (Langkah Ketiga)
4. Pelaksanaan (Langkah Keempat) dan
5. Evaluasi (Langkah Kelima)

Pengalaman dunia juga menunjukkan bahwa beberapa langkah di atas harus dilalui apabila kita ingin mencapai keberhasilan dalam tujuan jangka panjang program. Pengalaman juga menunjukkan bahwa program atau proyek akan menjadi lebih matang dan kuat apabila telah berhasil melewati satu putaran siklus. Pada skala

nasional atau lokal untuk mencapai satu lingkaran ini membutuhkan waktu beberapa tahun, karenanya adalah sangat penting untuk memahami lamanya waktu yang akan ditempuh dalam menyelesaikan satu rangkaian siklus ini untuk mencapai tujuan utama sebagai berikut: (1) memperbaiki dan mempertahankan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir, (2)

memperbaiki dan mempertahankan kelestarian ekosistem dan lingkungan wilayah pesisir. Pengalaman dunia juga membuktikan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar bagi keberhasilan pengelolaan pesisir terpadu sebagaimana sedang diterapkan di Desa Blongko. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain penerapan proses demokratis, partisipatif dan transparan bagi semua pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan kemauan keras untuk membangun kapasitas masyarakat dalam bekerjasama dengan lembaga pemerintah setempat.

Identifikasi isu yang dituangkan dalam profil ini merupakan langkah penting yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Blongko dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sumberdaya pesisir yang ada di Desa Blongko.



Gambaran Umum Desa Blongko



Kawasan Desa Blongko ditandai dengan pegunungan dan pepohonan menghijau terbentang di sepanjang desa. Jalan Trans Sulawesi membelah desa, memisahkan pemukiman penduduk, sebagian mengarah ke pantai dan sebagian mengarah ke perbukitan. Pantai di sepanjang desa ini memiliki hutan bakau yang melindungi desa serta terumbu karang di sepanjang pantai.

Masyarakat desa umumnya menjalankan kegiatan perikanan dan pertanian. Sebagian penduduk adalah sebagai petani dan sekaligus nelayan, sebagian lainnya sebagai petani saja atau nelayan saja. Selain itu ada juga

yang berdagang, bertukang dan bekerja sebagai karyawan.

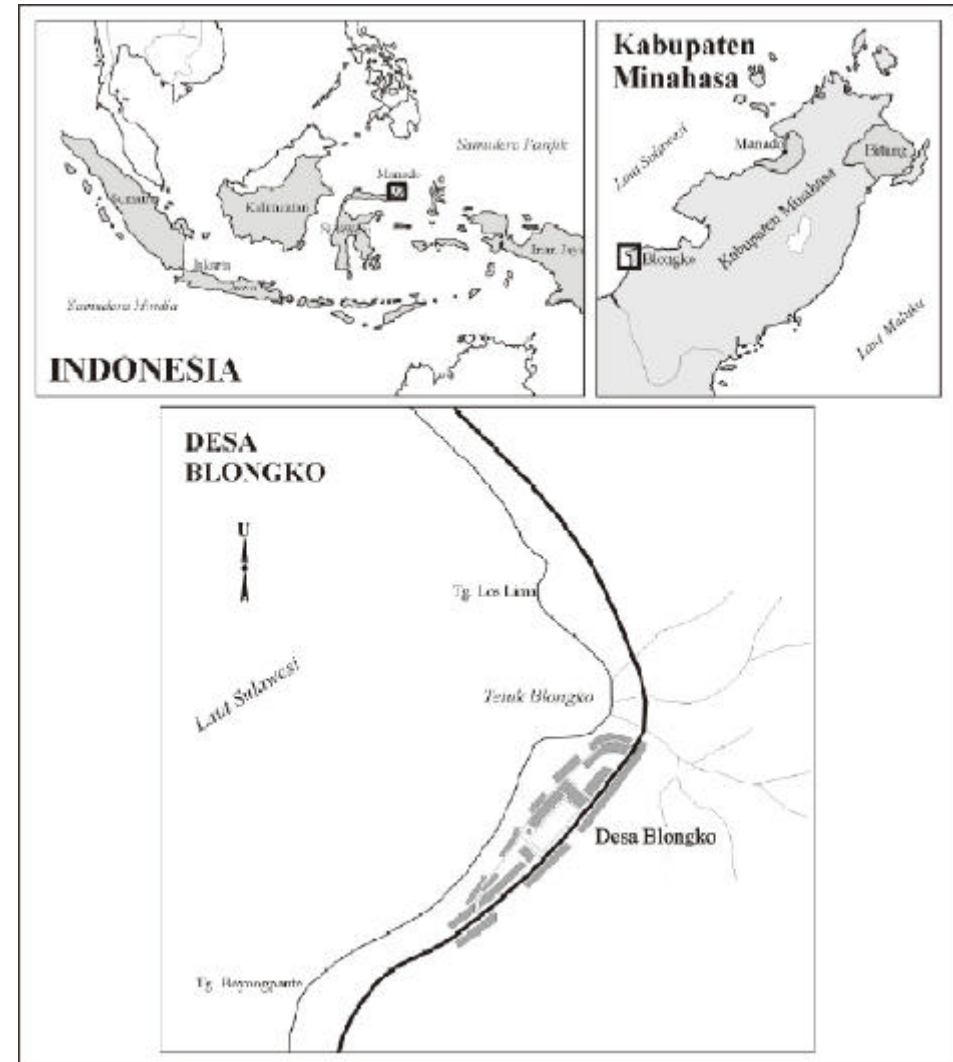
Bagaimanapun masyarakat Desa Blongko mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hasil perikanan, selain kegiatan pertanian yaitu menanam tanaman tahunan seperti kelapa, atau menanam jagung, kacang hijau dan aneka palawija.



Jalan Trans Sulawesi membelah desa, memisahkan pemukiman penduduk pada kiri dan kanan jalan.
(foto: Norma M.)

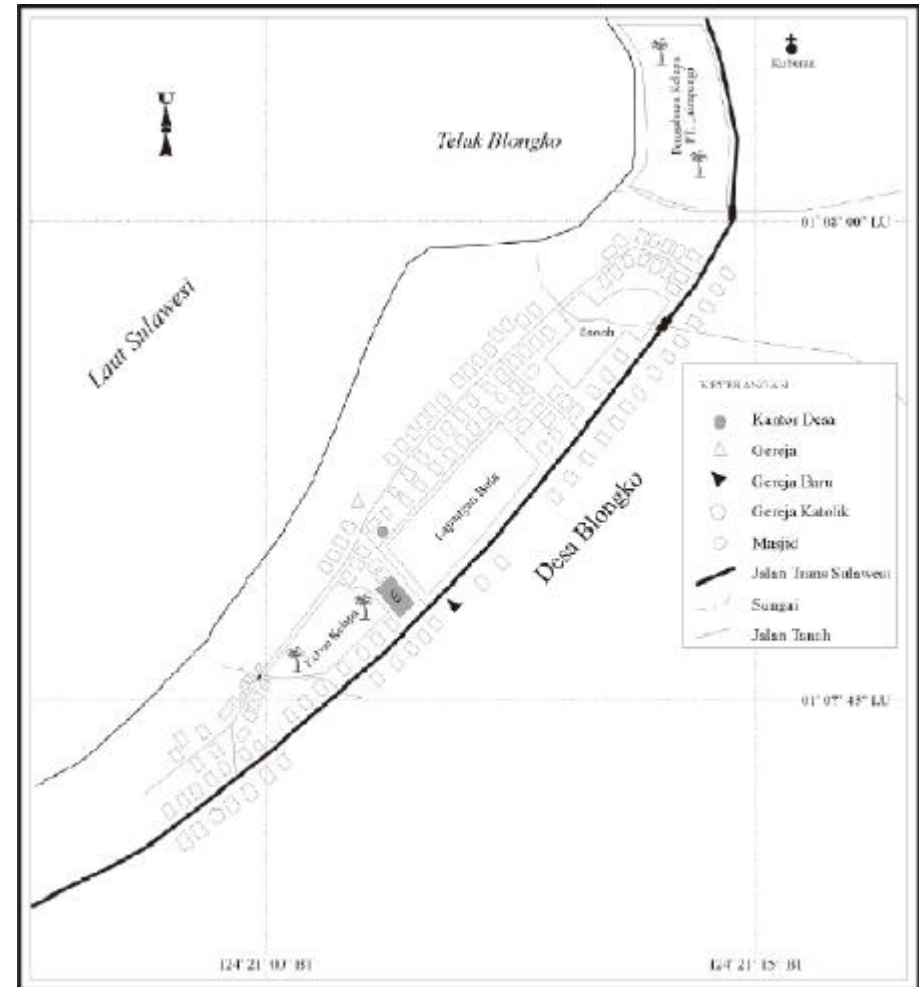
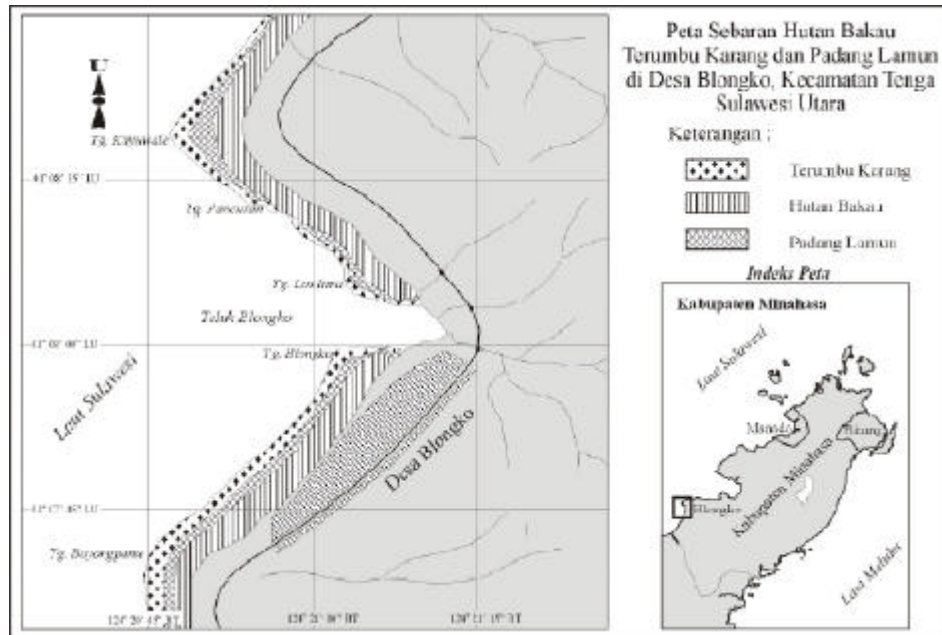


Pantai Desa Blongko dengan hutan bakau yang melindungi pantai.
(foto: Norma M.)



KARAKTERISTIK DESA	
■ Luas Daratan	800 H
■ Panjang Garis Pantai	6,5 Km
■ Jumlah Penduduk	1.251 Jiwa
■ Agama	Protestan 96 %
	Islam 2 %
	Katholik 2 %
■ Suku	Minahasa
	Mongondow
	Sangir
	Lain-lain

Peta Lokasi dan Peta Sebaran Habitat Pesisir Desa Blongko





Isu-isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Desa

Penanggulangan Banjir

Pada musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, pemukiman penduduk sering tergenang air (Dusun I dan Dusun II), jembatan yang terletak di Dusun I pada bulan Januari 1999 rusak diterjang banjir. Masyarakat memperkirakan tinggi genangan mencapai \pm 1 meter



Jembatan di Dusun I yang putus akibat banjir pada bulan Januari 1999
(foto: Norma Mangampe)

di atas permukaan tanah.

Diduga kuat bahwa keadaan ini disebabkan karena adanya penebangan hutan secara liar yang mulai terlihat di beberapa lokasi perbukitan, yang menyebabkan hutan mulai gundul. Penebangan liar sehingga gundulnya hutan yang menyebabkan banjir ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap manfaat hutan bagi perlindungan tanah, erosi dan pencegahan banjir masih kurang.

Penanganan Isu

Sampai saat ini belum ada penanganan dari instansi terkait, namun masyarakat mulai melakukan penanggulangan sementara dengan membuat parit dan tanggul batang kelapa walaupun tidak banyak membantu karena parit tersebut sering tertimbun sedangkan tanggulnya terbawa air.

Penyaluran Air Bersih

Keadaan air tawar di Desa Blongko secara umum dapat dikatakan baik. Air dari sumur-sumur gali cukup tawar (kadar garam rendah) walaupun masih ada kandungan garam sedikit. Biasanya air ini yang digunakan untuk mencuci dan mandi. Sedangkan air bersih (untuk air minum) cukup sulit diperoleh. Sumber mata air tersebar di setiap dusun (lokasi hutan) dan sumber mata air terbesar terdapat di lokasi Dusun I dan Dusun II yang berjarak sekitar 2-3 km dari perkampungan. Menurut masyarakat, keadaan debit air pada daerah sumber-sumber air ini telah



Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air dari sumur darurat seperti ini. (foto: Norma Mangampe)

mengalami perubahan sejak tahun 1982 dan yang paling terasa pada tahun 1986 yaitu setelah senso (alat pemotong kayu) mulai digunakan orang di Desa Blongko dan mulai saat itu sering terjadi penebangan pohon (Kasmidi, 1998). Situasi ini menjadikan masyarakat semakin sulit memperoleh air bersih. Selain itu juga belum ada sarana penyaluran dari sumber air ke pemukiman penduduk. Hanya beberapa anggota masyarakat saja yang bisa menikmati air dari sumber air yaitu untuk masyarakat yang relatif dekat dengan sumber air.

Mereka menyalurkan air bersih melalui bambu yang belum terjamin kebersihannya. Beberapa anggota masyarakat yang lain mengambil langsung ke sumber air, tapi sebagian besar menggunakan air yang belum memenuhi standar kesehatan yang berasal dari sumur-sumur gali, akibatnya sering terjadi gangguan kesehatan seperti diare dan penyakit kulit.

Penanganan Isu

Isu ini sedang ditangani melalui proyek air bersih dengan dana APBN yang dilaksanakan oleh instansi terkait (BANGDES Kabupaten, Dinas PU Dinas Kesehatan, Proyek Pesisir, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa) dan masyarakat sedang menunggu realisasi dari proyek ini.

Proyek Pesisir memberikan bantuan dana untuk anggaran air bersih, sebagai bagian dari pelaksanaan awal Proyek Pesisir untuk Desa Blongko yang diharapkan mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan air bersih ini.

Perusakan Hutan (Daerah resapan Air)

Perbukitan sekitar Desa Blongko mulai terlihat gundul di beberapa tempat yang menurut pengamatan masyarakat sudah pada taraf memprihatinkan.

Penebangan pohon semakin sering terjadi, termasuk pada pepohonan di daerah peresapan air. Kayu-kayu dari pohon itu diambil untuk dijual di dalam maupun di luar desa. Berbagai sumber mengatakan



Salah satu hutan resepan air yang rusak, dari total luas hutan yang rusak diperkirakan 25 Ha
(foto: Norma Mangampe)

bahwa hal ini diperkirakan terjadi sejak tahun 1986 yaitu sejak masuknya senso (*Chainsaw*) di Desa Blongko. Selain alasan tersebut di atas menurut masyarakat penyebab lain dari perusakan hutan (hutan gundul) adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat pohon/hutan di daerah resapan air, selain tekanan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk.

Isu ini bila tidak ditangani dengan serius akan mengakibatkan dampak negatif yang cukup besar bagi masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih yang semakin berkurang, peningkatan erosi yang mengakibatkan banjir dan dampak lebih jauh lagi yaitu lingkungan laut khususnya terumbu karang akan terpengaruh dengan masuknya sedimen-sedimen yang berasal dari daratan.

Penanganan Isu

Penanganan isu ini baru sebatas pengawasan berupa larangan informal perombakan hutan, khususnya daerah resapan air, apabila terpaksa ingin melakukan penebangan pohon harus meminta persetujuan dalam bentuk surat ijin kepala desa untuk diperiksa apakah berada di lokasi resapan air atau tidak.

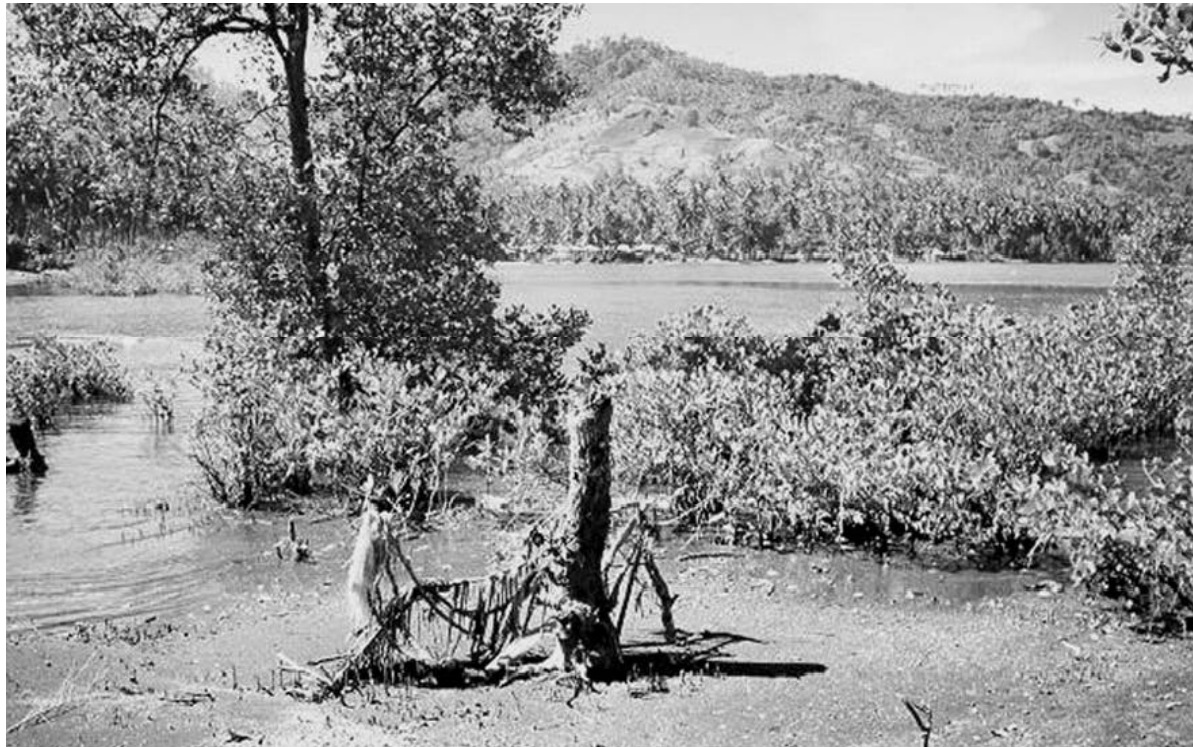
Tapi yang sering terjadi adalah penebangan liar tanpa surat ijin, sedangkan penegakan hukum masih sangat lemah.

Perusakan Hutan Bakau

Bakau sejak dulu dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Blongko untuk berbagai kepentingan. Selain untuk bahan bangunan, juga digunakan sebagai kayu bakar untuk kegiatan konsumsi rumah tangga. Sekitar tahun 1962-1965 masyarakat memanfaatkan bakau sebagai kayu bakar untuk pembakaran karang dalam pembuatan

kapur rumah pengganti semen dan cat. Kerusakan bakau ini semakin besar pada tahun 1972. Pada waktu itu pengambilan kayu bakau digunakan sebagai kayu bakar untuk pembakaran karang dan aspal sedangkan pada saat bersamaan juga dilakukan pengambilan karang oleh proyek jalan yang menggunakan alat besar, yang juga turut merusak pohon-pohon bakau.

Dampak dari kegiatan ini adalah terkurasnya hutan bakau di sekitar Teluk Blongko terutama di Dusun I dan terjadi pengikisan pantai. Selain itu kerusakan bakau juga terjadi di lokasi Dusun III yang ditandai dengan habisnya pohon bakau yang tua dan yang tersisa adalah pohon bakau yang masih muda, sehingga pada saat musim ombak besar (musim angin barat dan angin selatan), air laut dengan mudahnya menerpa masuk sampai ke pemukiman penduduk seperti yang terlihat di lokasi muara Sungai Air Panas sampai Tanjung Solo.



Diperkirakan 10 Ha luas hutan bakau pada umumnya ditumbuhi pohon bakau muda. (foto: Norma Mangampe)



Caption:
foto:?

Penanganan Isu

Isu ini sudah berusaha ditangani oleh pemerintah desa dengan mengeluarkan pelarangan penebangan pohon bakau. Usaha ini ditindaklanjuti bersama masyarakat yang dimulai pada tahun 1998 melalui pengelolaan lingkungan pantai yang berbasis masyarakat dengan membuat Surat Keputusan Desa tentang Peraturan Daerah Perlindungan Laut termasuk bakau dan terumbu karang. Upaya penanganan lain yaitu bersama Proyek Pesisir yang bekerja sama dengan LSM (LP3M Ujung Pandang) melakukan studi banding “Pengelolaan Hutan Bakau” di Sinjai, Ujung Pandang, dengan mengutus seorang wakil masyarakat dari Desa Blongko.



Peserta studi banding”Pengelolaan Hutan Bakau” mengadakan diskusi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Erosi Pantai

Erosi pantai terlihat jelas di pantai Dusun I. Menurut informasi masyarakat, erosi ini sudah terjadi sejak tahun 1953 dan erosi secara cepat terjadi di tahun 1972. Hal ini disebabkan karena adanya pengambilan karang dalam jumlah besar oleh pelaksana Proyek Jalan Trans Sulawesi, adanya pengambilan pasir pantai dan pengambilan/penebangan

pohon bakau oleh masyarakat dari dalam dan luar desa. Secara umum erosi pantai ini terjadi di sepanjang Teluk Blongko di belakang permukiman penduduk. Penduduk yang tinggal di sepanjang Teluk Blongko mulai merasa terancam oleh erosi tersebut sehingga mereka terpaksa pindah ke lokasi lain.



Pantai Desa Blongko mengalami pengurangan hampir setiap tahun.
Foto: Norma Mangampe

Contoh akibat erosi ini adalah pusat informasi masyarakat Desa Blongko yang pada bulan Maret 1999 terpaksa dipindahkan oleh masyarakat secara gotong royong karena sebagian tanah tempat dibangunnya pusat informasi telah mengalami erosi, sehingga sebagian bangunannya nampak tidak terletak di tanah lagi. Masyarakat yang melihat hal ini mengambil keputusan untuk memindahkan pusat informasi tersebut ke belakang rumah Kepala Dusun I (Donald Yanis) yang berjarak kira-kira 100-150 meter dari tempat semula.



Kondisi bangunan Pusat Informasi Masyarakat yang mengalami erosi pada bulan Maret 1999.
Foto: Erick Armada



Masyarakat secara gotong royong memindahkan Pusat Informasi yang terkena erosi.
Foto: Femmy Lumolos

Penanganan Isu

Isu ini sampai sekarang belum ditangani dengan baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat, namun pemerintah desa dan beberapa kelompok masyarakat sudah merencanakan untuk mengadakan penanaman bakau disepanjang Teluk Blongko.

Pemasaran Hasil Perikanan

Hasil tangkapan ikan di Desa Blongko cukup banyak malah pada bulan-bulan tertentu bahkan melimpah, khususnya tangkapan jenis ikan cakalang. Usaha penangkapan ikan semakin meningkat sejak dioperasikannya perahu *katingting* (motor laut untuk penangkapan) di desa. Namun sekalipun hasilnya cenderung naik, harga yang diberikan

oleh para pedagang pengumpul (*tibo-tibo*) belum menunjukkan tingkat yang layak bagi para nelayan tangkap. Hal ini terjadi karena masing-masing *tibo-tibo* berusaha sendiri dan belum terorganisir, sehingga kemampuan untuk membeli ikan dari nelayan sangat terbatas, akibatnya para nelayan lebih suka menjual ikannya ke *tibo-tibo* besar dari luar desa yang memberikan harga lebih layak/baik. Akibatnya pada musim ikan banyak, harga ikan menjadi murah bahkan ada yang tidak terjual.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa permasalahan utama yaitu pemasaran hasil. Untuk itu perlu ada pengelolaan pasar melalui pengorganisasian *tibo-tibo* dan pengolahan hasil tangkapan bila harga menjadi murah padahal hasil melimpah. Pengolahan hasil tangkapan yang dimaksud dapat berupa pengasapan, pengasinan, dan lain-lain, sehingga harga ikan tetap baik walaupun pada saat/musim banyak ikan.



Alat penangkap ikan yang disebut dengan “Pajeko”
Foto: Meidi Kasmidi

Penanganan Isu

Pernah dilakukan upaya membentuk kelompok perempuan *tibo-tibo* ikan, tapi belum berjalan dengan baik karena kelemahan organisasi. Untuk pengolahan hasil perikanan belum pernah ada upaya atau introduksi teknologi yang tepat.

Anak Putus Sekolah

Banyaknya anak putus sekolah di Desa Blongko sudah masuk pada tingkat memprihatinkan. Menurut data administrasi kependudukan desa, jumlah anak usia sekolah yang bersekolah (SD-SMP) adalah 70 orang sedangkan jumlah anak yang tidak bersekolah 168 orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pertama rendahnya tingkat pendapatan orang tua yang mengakibatkan waktu anak lebih banyak dipakai untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah, tapi ada juga orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Faktor kedua adalah kurangnya kesadaran orang tua sehingga pendidikan anak belum menjadi prioritas.

Akibat dari permasalahan di atas, banyak terjadi kenakalan remaja, pengangguran meningkat karena mereka tidak mempunyai ketrampilan kerja dan akibat secara tidak langsung adalah sulitnya memberikan pengarahan tentang masalah lingkungan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena generasi sekarang merupakan generasi masa depan dan apabila sumberdaya manusianya lemah maka sumberdaya alamnya pun tidak akan mengalami peningkatan atau bahkan akan rusak.



Perbandingan anak usia sekolah yang bersekolah dengan yang tidak sekolah adalah 1:2,5.
Foto: Norma Mangampe

Penanganan Isu

KANDEP P dan K melalui pemerintah desa melaksanakan program Paket A dan SMP terbuka. Selain kegiatan ini masyarakat juga memikirkan alternatif lain yaitu membuka Balai Latihan Kerja (BLK) di dalam desa, sehingga anak-anak yang putus sekolah bisa mendapat ketrampilan kerja.



Anak-anak ini rindu akan informasi/ pengetahuan, mereka sedang mendapatkan pendidikan lingkungan hidup melalui video.
Foto: Meidi Kasmidi



Gedung SD ini adalah satu-satunya fasilitas sekolah yang ada di Desa Blongko.
Foto: Norma Mangampe

Sanitasi Lingkungan

Masalah sampah masih menjadi prioritas bagi masyarakat Desa Blongko pada umumnya terutama pada pemukiman penduduk di pantai. Penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, belum ada sarana yang baik untuk pembuangan air dan kotoran manusia, termasuk sarana MCK masih terbatas (dari 288 bangunan rumah hanya 18,4 % yang punya WC lengkap

dengan *septik tank* dan 81,6 % WC tanpa *septik tank*) dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan. Kondisi seperti ini terjadi di Dusun I, II, dan III. Akibat dari masalah ini adalah masyarakat sering terserang penyakit muntaber, diare dan malaria, pemandangan desa dan pantai menjadi kotor. Isu ini berkaitan erat dengan pencemaran lingkungan dan pemanfaatan MCK yang benar.



Penanganan Isu

Penanganan isu ini pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan memberikan penyuluhan kebersihan lingkungan dan penempatan petugas kesehatan di desa. Penanganan isu ini pula dilakukan oleh Proyek Pesisir dengan program pembangunan MCK sebagai salah satu kegiatan pelaksanaan awal pada tahun 1998/1999.

Jenis sampah yang umumnya terdapat di pantai adalah dedaunan, kulit buah kelapa, plastik dan lain-lain, sedangkan sampah di dalam perkampungan umumnya adalah sampah rumah tangga
Foto: Norma Mangampe

Penangkapan Satwa Langka

Beberapa satwa langka seperti Penyu, Duyung dan Hiu masih terdapat di pantai Desa Blongko. Khusus untuk Duyung dan Hiu relatif tidak diganggu oleh masyarakat, karena masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa Duyung dan Hiu sebagai pembawa keberuntungan, sehingga setiap kali Duyung atau Hiu terlihat di pantai, para nelayan mulai bersiap-siap untuk ke laut karena pertanda akan banyak ikan. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk Penyu yang biasa disebut *Tuturuga*. Penduduk Blongko menangkap Penyu untuk dimakan dan dijual. Penangkapan Penyu terjadi dalam jumlah besar pada musim-musim hari raya seperti Hari Natal, Tahun Baru dan Pengucapan Syukur. Berdasarkan cerita masyarakat “sekarang masyarakat sudah jarang melihat Penyu di pantai Blongko”. Pengurangan ini menjadi keprihatinan karena jumlah Penyu semakin berkurang sedangkan kegiatan penangkapan terus berjalan.

Penanganan Isu

Berdasarkan pengamatan di lapangan belum ada penanganan isu, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Belum ada pelarangan ataupun tindakan lain yang dilakukan di desa dalam rangka penyelamatan Penyu atau pengurangan aktivitas penangkapan Penyu.



Penyu, hewan yang dilindungi, masih diburu masyarakat.
Foto: Norma Mangampe

Penangkapan Ikan yang Merusak

Turunnya produksi perikanan di pantai Desa Blongko sangat berkaitan erat dengan kegiatan masyarakat dalam penangkapan ikan dengan menggunakan cara-cara yang merusak. Sekarang ini masih ada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan pemboman dan meracun

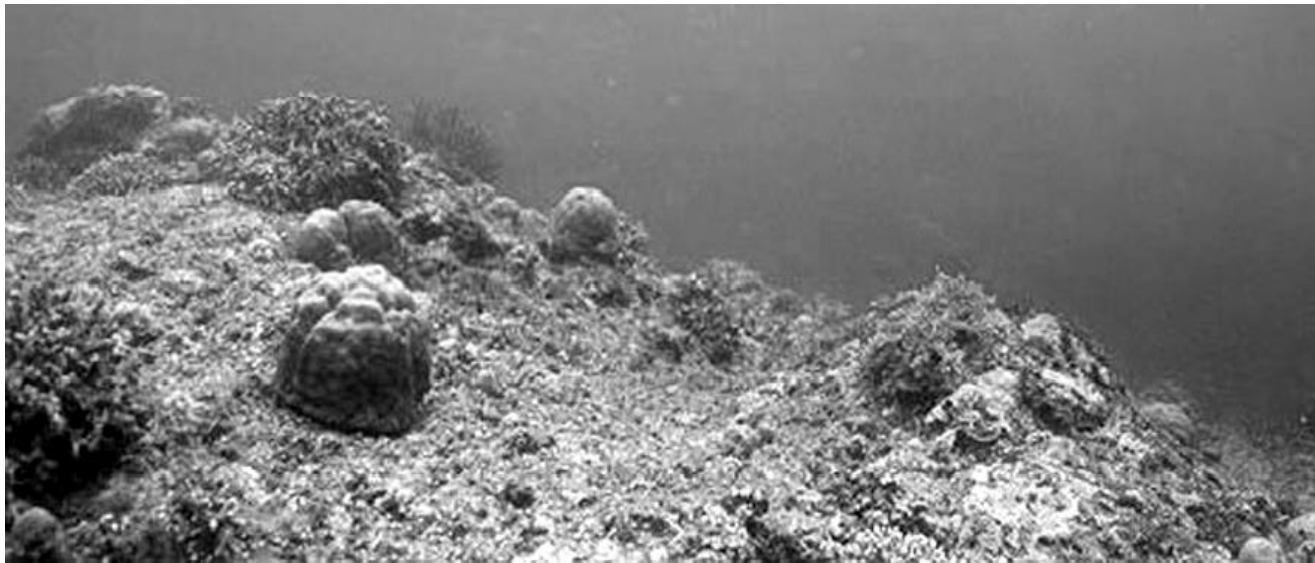
ikan. Tapi yang sangat mengkhawatirkan masyarakat adalah pemboman ikan oleh nelayan yang berasal dari luar Desa Blongko. Para pelaku biasanya datang dengan aparat yang bersenjata dan setiap kali melakukan pemboman dalam jumlah yang besar.



Terumbu karang yang masih bagus.
Foto: Christovel Rotinsulu

Penanganan Isu

Isu ini sudah ada penanganan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat juga dari berbagai instansi terkait. Pemerintah desa sudah berusaha memberikan pembinaan, teguran bahkan laporan ke Polisi bagi pelaku pemboman ikan. Masyarakat dengan difasilitasi Proyek Pesisir mencoba membuat satu model pengelolaan wilayah pesisir dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan Daerah Perlindungan Laut dimana kesepakatan pengaturannya termuat dalam satu bentuk Surat Keputusan Masyarakat Desa Blongko. Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan dilakukan melalui kerja sama Proyek Pesisir dengan Fakultas Hukum UNSRAT Manado. Penanganan isu ini juga dilakukan oleh Dinas Perikanan dengan memberikan pelatihan penangkapan ikan kepada nelayan sekaligus memberikan paket bantuan perahu bermotor (*katinting*) dan Bappeda melalui pemberian bantuan 6 buah perahu bermotor (*katinting*). Bantuan nelayan juga diberikan oleh IKIP-BNI berupa satu unit *pajeko*. Bantuan-bantuan ini diharapkan memberikan ketrampilan dan sarana penangkapan kepada nelayan, sehingga kegiatan perusakan lingkungan dapat berkurang, karena pada prinsipnya nelayan Desa Blongko tidak mau merusak sumberdayanya sendiri jika masih mempunyai pilihan yang lebih baik.



Terumbu karang rusak akibat kegiatan pemboman ikan.
Foto: Christovel Rotinsulu

Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Perkebunan

Masyarakat Desa Blongko tidak hanya bergantung pada hasil perikanan tapi juga sangat bergantung pada hasil pertanian dan kondisi ini berimbang antara nelayan dan petani. Masalah pertanian lebih dititikberatkan pada kurangnya hasil perkebunan/pertanian dan masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh petani.



Lahan pertanian yang belum diolah dengan baik.
Foto: Norma Mangampe

Hal ini disebabkan oleh pengolahan lahan pertanian masih secara tradisional, dimana hutan dirombak kemudian ditanami dengan tanaman musiman dan belum langsung ditanami dengan tanaman tahunan. Situasi di atas menyebabkan produksi untuk tanaman tahunan saat ini masih kurang. Penyebab lain adalah sulitnya memperoleh benih tanaman perkebunan dan adanya kegiatan pengolahan lahan secara berpindah. Lokasi penyebaran isu ini terjadi dari Dusun I sampai Dusun III.

Penanganan isu ini sangat penting karena akan membantu pencegahan terjadinya erosi dari lahan pertanian, meningkatkan debit air di daerah sekitar sumber mata air serta meningkatkan pendapatan petani.

Penanganan Isu

Penanganan isu sudah dilakukan oleh masyarakat dan Dinas Perkebunan. Sebagian masyarakat telah melakukan penanaman secara gotong royong kemudian dibantu melalui proyek kredit penanaman kelapa hibrida dan kelapa dalam dari Dinas Perkebunan, namun belum seluruhnya terjangkau.

Perencanaan



Perencanaan Oleh Masyarakat

Isu-isu sumberdaya wilayah pesisir di Desa Blongko yang telah diuraikan merupakan masalah tetapi ada juga yang sekaligus potensi yang perlu ditangani. Susunan isu dalam penulisan profil ini sudah merupakan susunan skala prioritas isu yang ditentukan masyarakat melalui musyawarah. Beberapa isu kelautan sudah coba ditangani oleh masyarakat dengan salah

satu kegiatan yaitu penetapan Daerah Perlindungan Laut oleh Masyarakat. Sebagian isu-isu yang ada akan dikelola melalui Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut sedangkan isu-isu lainnya akan masuk dalam pengelolaan desa.

Profil ini merupakan acuan masyarakat dalam membuat rencana pengelolaan yaitu dengan melihat setiap isu dalam profil ini sehingga penanganannya juga dilakukan isu per isu tapi mempunyai keterpaduan antar isu. Keterpaduan ini akan terlihat dalam rencana pengelolaan yang akan dibuat oleh masyarakat Desa Blongko melalui Kelompok Inti.

Profil ini bisa saja mengalami perubahan berupa pengurangan atau penambahan isu dikemudian hari, karena informasi isu-isu ini terakhir didokumentasikan pada bulan Maret 1999.

Diharapkan profil yang sangat sederhana ini dapat dipakai oleh semua pihak baik masyarakat Desa Blongko maupun instansi pemerintah dalam melakukan perencanaan di desa.



Kegiatan pelatihan monitoring terumbu karang merupakan salah satu bentuk penyiapan / pembekalan masyarakat dalam pengelolaan Daerah Perlindungan Laut oleh Masyarakat.
Foto: Norma Mangampe

Daerah Perlindungan Laut

Tujuan pengadaaan daerah perlindungan laut adalah dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di sekitar daerah perlindungan laut sekaligus melindungi keanekaragaman makhluk hidup dan terumbu karang di dalam daerah perlindungan laut. Upaya ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjaga dan mengelola daerah perlindungan laut tersebut.

Ide pembuatan daerah perlindungan laut seluas 6 ha ini dimulai saat Proyek Pesisir memfasilitasi studi lapang ke Pulau Apo, Filipina yang diikuti oleh Norma Mangampe, warga masyarakat Desa Blongko yang diikuti pula oleh kunjungan Kepala Desa dan seorang anggota masyarakat Pulau Apo ke Desa Blongko. Sadar akan arti peningkatan produksi perikanan dan pentingnya melindungi keanekaragaman sumberdaya bagi

generasi mendatang, pemerintah dan masyarakat Desa Blongko bekerjasama dengan Proyek Pesisir merancang pembuatan daerah perlindungan laut di Desa Blongko yang dimulai dengan pengumpulan data, pelatihan monitoring terumbu karang, penyuluhan, penentuan lokasi, dan pembuatan aturan lewat pertemuan-pertemuan formal dan informal yang melibatkan seluruh pihak terkait antara lain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pemimpin informal/ keagamaan, guru, nelayan, petani, buruh, kelompok masyarakat, pemuda sampai murid sekolah dasar.



Kelompok pengelola sedang mengamati daerah terumbu karang.

Foto: Tanyo Bangun

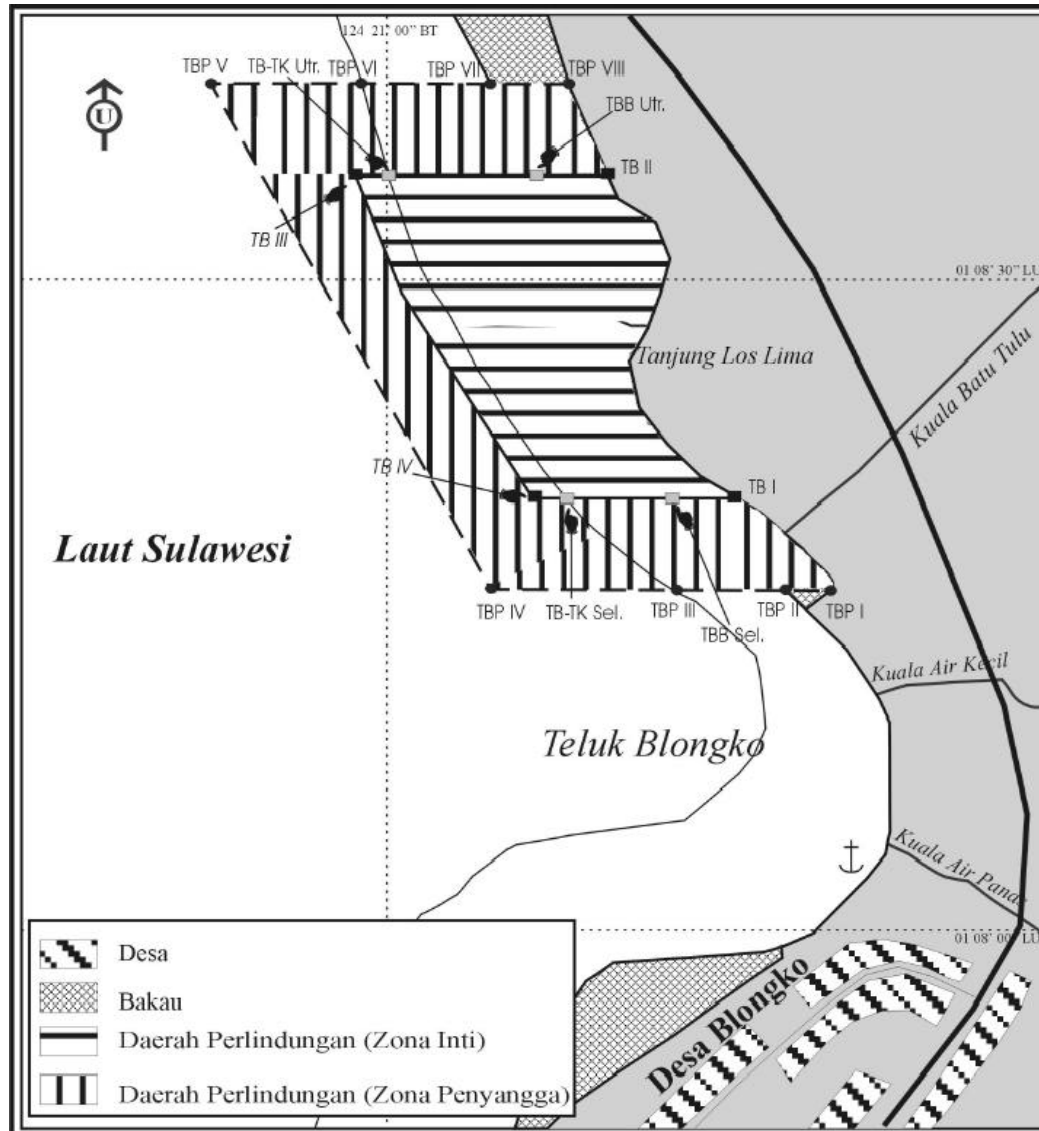


Monitoring dengan menggunakan Metode Manta Tow
Foto: Meidi Kasmidi



Berbagai dukungan dalam pembuatan aturan dan konsep daerah perlindungan datang mulai dari pemerintah pusat dan daerah, juga perguruan tinggi sehingga pada tanggal 26 Agustus 1998 di ruang pertemuan Balai Desa telah disepakati aturan dan lokasi daerah perlindungan laut yang dimaksud. Lewat daerah perlindungan laut berbasis masyarakat ini masyarakat Desa Blongko kini lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi sumberdaya pesisir yang secara langsung berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat Desa Blongko yang dahulunya pengguna murni sekarang dalam proses menjadi pengelola sumberdaya.

Daerah perlindungan laut dalam ukuran kecil ini jika digunakan sebagai model dan diterapkan di seluruh desa pesisir di Sulawesi Utara maupun di Indonesia akan secara nyata dapat meningkatkan jumlah dan luas daerah pesisir yang dilindungi. Berbagai lembaga, kelompok dan perorangan sudah mengunjungi Blongko untuk belajar dari pengalaman masyarakat.



Peta Lokasi Daerah Perlindungan Laut Desa Blongko

Keterangan :

TB I = Titik Batas I TB II = Titik Batas II
 TB III = Titik Batas III TB IV = Titik Batas IV

TBP I = Titik Batas Penyangga I
 TBP II = Titik Batas Penyangga II
 TBP III = Titik Batas Penyangga III
 TBP IV = Titik Batas Penyangga IV
 TBP V = Titik Batas Penyangga V
 TBP VI = Titik Batas Penyangga VI
 TBP VII = Titik Batas Penyangga VII
 TBP VIII = Titik Batas Penyangga VIII

TBB Utr. = Titik Batas Bakau Bagian Utara
 TBB Sel. = Titik Batas Bakau Bagian Selatan

TB-TK Utr. = Titik Batas Terumbu Karang Bagian Utara
 TB-TK Sel. = Titik Batas Terumbu Karang Bagian Selatan

Indeks Peta



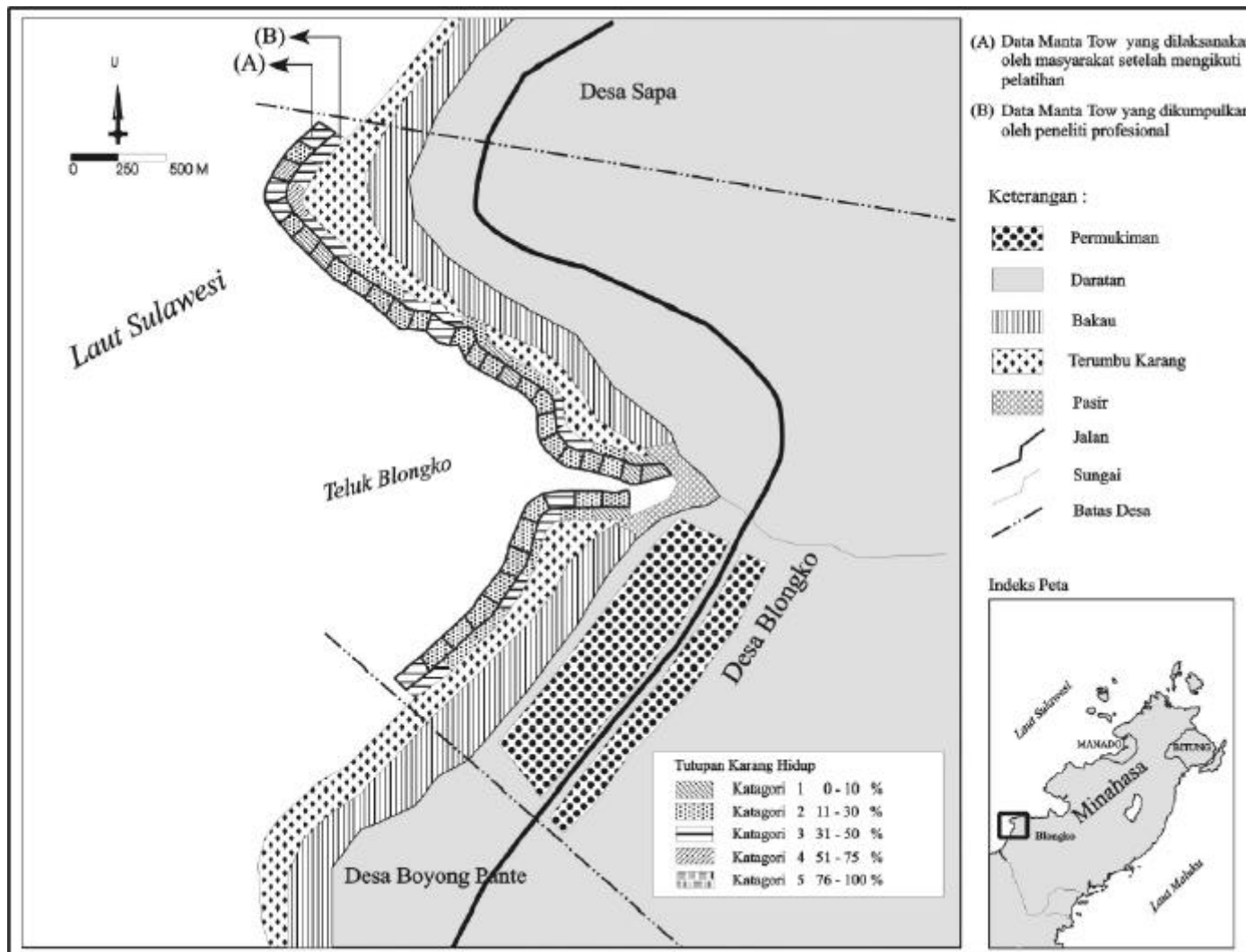
Daftar Pustaka

- Fraser, N. M., A. Siahainenia and M. Kasmidi. 1998. Preliminary Results of Participatory Manta Tow Training: Blongko, North Sulawesi. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources Management*. Volume 1, No.1, pp. 31 -34.
- Kasmidi, M. 1998. *Sejarah Penduduk dan Lingkungan Hidup Desa Blongko, Kecamatan Tenga*. Proyek Pesisir Technical Report No. TE-98/01-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. pp. 12.
- Kussoy, P., B.R. Crawford, M. Kasmidi dan A. Siahainenia. *Aspek Sosial-Ekonomi Untuk Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir di Desa Blongko Sulawesi Utara*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (Draft).
- Depdagri. 1997. *Profil Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, Buku I*. Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia. pp. 96.

Lampiran-lampiran



Lampiran 1. Peta Perbandingan Hasil Pengamatan Kondisi Terumbu Karang antara Masyarakat dengan Peneliti Profesional



Lampiran 2. Daftar Pertemuan-pertemuan, Latihan-latihan dan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI
28 Agustus'97	Pertemuan sosialisasi Proyek Pesisir untuk masyarakat Dusun I	Dusun I
29 Agustus'97	Pertemuan sosialisasi Proyek Pesisir untuk masyarakat Dusun II dan III	Balai Desa Blongko
10 -13 November'97	Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat dasar	Dusun III
18 November'97	Penjelasan kegiatan proyek pesisir (anggota LKMD dan PKK)	Balai Desa Blongko
19 November'97	Penjelasan kegiatan proyek pesisir (kelompok pemuda)	Balai Desa Blongko
26 November'97	Sharing pengalaman "Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Pulau Apo Philippina (masyarakat Dusun II dan III)"	Dusun II dan III Desa Blongko
27 November'97	Sharing pengalaman "Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Pulau Apo Philippina (masyarakat Dusun I dan II)"	Dusun I dan II Desa Blongko
15 Desember'97	Musyawah pelaksanaan awal: pembuatan MCK Desa (kepala Desa, anggota LKMD dan tokoh-tokoh agama)	Balai Desa Blongko
3 -16 Februari'98	Studi banding usaha wisata rakyat	Manado
12 Februari'98	Musyawah pelaksanaan awal: pembuatan MCK Desa dan penjelasan strategi rencana kerja Desa Tahun kedua (anggota LKMD)	Dusun II Blongko
18 Februari'98	Musyawah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK Desa dan sharing hasil pelatihan Studi Banding Usaha Wisata Rakyat (Masyarakat Dusun III)	Dusun III Blongko
20 Februari'98	Musyawah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK desa dan sharing hasil pelatihan usaha wisata rakyat (masyarakat Dusun II)	Dusun II Blongko
24 Februari'98	Musyawah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK desa dan sharing hasil pelatihan usaha wisata rakyat (masyarakat Dusun I)	Dusun I Blongko

TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI
4 -10 Maret'98	Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat dasar	Dusun I
11-13 Maret'98	Pelatihan monitoring terumbu karang untuk tingkat dasar	Dusun I
13 Maret'98	Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan Daerah Perlindungan Laut (masyarakat dusun I)	Dusun I Blongko
14 Maret'98	Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan Daerah Perlindungan Laut (masyarakat dusun II)	Dusun II Blongko
15 Maret'98	Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan lokasi Daerah Perlindungan Laut (masyarakat dusun II)	Dusun III Blongko
19-20 Maret'98	Konferensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia	Bogor
7 April'98	Musyawarah aturan main Daerah Perlindungan Laut (kelompok pemanfaat: nelayan glining, nelayan perahu lampu, dan pengambil kayu bakau)	Dusun I dan dusun II
23-24 April'98	Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat advance	Dusun III
2-11 Mei'98	Pelatihan pengembang kelompok swadaya	Manado
19 Mei'98	Musyawarah tentang draft I aturan Daerah Perlindungan Laut (SK-Desa). (Tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan agama)	Dusun III
10 Juni'98	Musyawarah evaluasi pembangunan MCK dan laporan keuangan. (Tim UPS)	Dusun I
10 Agustus'98	Musyawarah: Evaluasi pembangunan MCK, proyek air bersih dari Bandes Kabupaten dan pembentukan/pemilihan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut. (Tim UPS, Kepala-kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat)	Dusun II

TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI
13 Agustus'98	Musyawarah pemilihan kelengkapan pengurus dan anggota Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan diskusi gambaran tugas dan tanggung jawab. (Kepala Desa, kepala-kepala dusun, LKMD, Tim UPS, Tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru dan masyarakat)	Dusun I
26 Agustus'98	Musyawarah Desa persetujuan SK Desa "Daerah Perlindungan Laut" masyarakat Desa Blongko. (Masyarakat dan Tim Proyek Pesisir)	Dusun II (Balai Desa)
2-7 November'98	Pelatihan ICM untuk kelompok inti masyarakat	Tomohon
14 Oktober'98	Musyawarah tentang strategi Pendidikan Lingkungan Hidup untuk anak-anak Sekolah Dasar. (Konsultan, EO, guru-guru).	Dusun II
Desember'98	Sosialisasi Profil Sumberdaya wilayah Pesisir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal	Dusun I dan Dusun II
13 Januari'99	Musyawarah: Sosialisasi Profil Sumberdaya wilayah Pesisir, Laporan kegiatan dan keuangan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut, Laporan kegiatan pembangunan MCK oleh Tim UPS.	Dusun I
17 Januari'99	Musyawarah sosialisasi Profil sumberdaya wilayah pesisir dan aturan main kelompok usaha katinting, (Masyarakat dan nelayan)	Dusun I
16 April'99	Peresmian Marine Sanctuary (Daerah Perlindungan Laut)	Dusun I
24 Mei'99	Diskusi Tim COREMAP dengan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan Masyarakat	Dusun I (Pusat Informasi)